



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



MANUAL INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2026



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : ... TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Utama BKN, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029.**

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pasal 1

- (1) Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara wajib:

- 1) Menyusun Perencanaan Strategis menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang diimplementasikan secara komprehensif pada semua level unit organisasi, satuan kerja dan kantor regional BKN.
- 2) Menyusun Peta Strategis dan IKU di lingkungan unit kerja, yang tertuang ke dalam manual IKU, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN.

- 3) Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan unit kerja masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan; dan
- 4) Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari unit organisasi, satuan kerja, dan kantor regional BKN masing-masing yang memiliki kontribusi atas IKU Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis BKN merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKN yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh hasil dari program BKN. Penyusunan sasaran strategis BKN menggunakan model *Balanced Scorecard* (BSC). Sekretariat Utama memiliki tanggung jawab pada aspek *Learning & Growth Perspective*.

Learning & Growth Perspective merupakan gambaran atas optimalnya organisasi BKN dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini tercermin dalam “Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital”. Rumusan ini dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis diposisikan sebagai Sasaran Strategis 2, dengan indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BKN. Lebih lanjut, sasaran strategis ini didukung oleh sasaran program sebagai berikut:

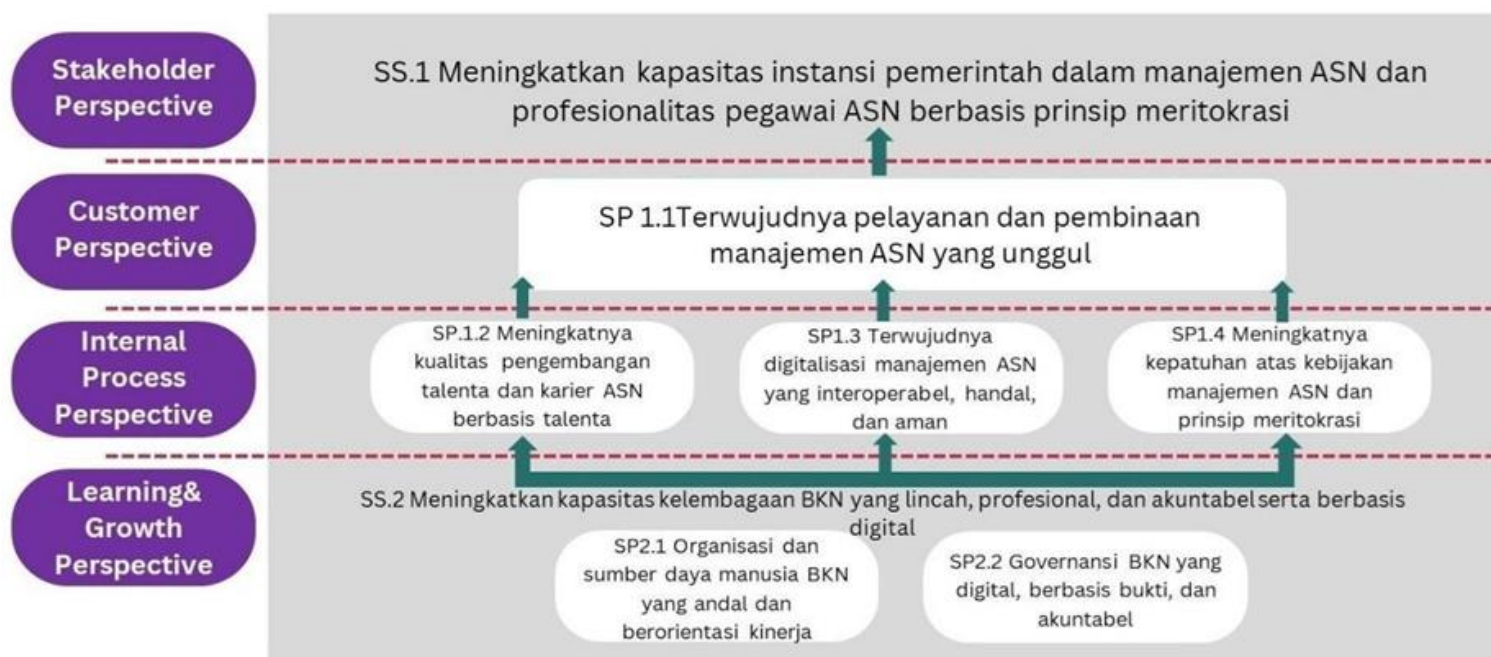
- 1) SP 2.1 – Organisasi dan sumber daya manusia BKN yang andal dan berorientasi kinerja
 - a. Skor evaluasi AKIP BKN;
 - b. Indeks Sistem Merit BKN.
- 2) SP 2.2 – Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel
 - a. Opini BPK atas laporan keuangan BKN;
 - b. Indeks SPBE BKN;
 - c. Level maturitas SPIP Terintegrasi BKN

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

PETA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA

TAHUN 2025-2029



**INDIKATOR KINERJA PROGRAM SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025- 2029**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN di wilayah Kelompok Kerja I	-	100	100	-	-
2	Nilai Reformasi Birokrasi BKN	90	90,25	90,50	90,75	91
3	Nilai Evaluasi AKIP BKN	70,1	71,5	72,5	73,5	75
4	Nilai Sistem Merit BKN	385	400	400	400	400
5	Skor Evaluasi AKIP Sekretariat Utama BKN	71	72	73	74	75
6	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Utama BKN	92	93	94	95	97
7	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dilingkungan Sekretariat Utama	100	100	100	100	100
8	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di BKN	100	100	100	100	100
9	Opini BPK atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Indeks SPBE BKN	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
11	Level Maturitas SPIP Terintegrasi BKN	4	4	4	4	4
12	Indeks Pengawasan Kearsipan BKN	82	85	88	90	92
13	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN	93,25	93,50	93,75	94	94,25
14	Persentase capaian inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Sekretariat Utama	100	100	100	100	100
15	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari dilingkungan Sekretariat Utama	90	95	95	95	95
16	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran dilingkungan Sekretariat Utama	4	4	4	4	4
17	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama	0	0	0	0	0

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN

Perspektif	<i>Stakeholder Perspective</i>
Sasaran Program	Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan Manajemen ASN dan Prinsip Meritokrasi
Deskripsi sasaran Program	Peningkatan kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN serta profesionalitas pegawai berbasis meritokrasi merupakan prioritas strategis pemerintah. Prinsip meritokrasi memastikan keputusan dalam rekrutmen, pengembangan, dan promosi ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas secara objektif. Langkah konkret seperti seleksi berbasis kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan disertai proses mekanisme evaluasi kinerja yang transparan dan adil dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Sebagai hasilnya ASN yang profesional mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, mendukung pembangunan nasional, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah
Indikator Kinerja Program	Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi : Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Kegiatan pembinaan ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
	Formula :
	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang Dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan
	Tujuan :
	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU	(X) Tinggi () Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKU	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Seluruh unit kerja/Kelompok Kerja

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Sumber Data	- Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN - Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN - Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan
Mitigasi risiko	- Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi - Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri - Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. - Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. - Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 2. Nilai Reformasi Birokrasi BKN

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital
Deskripsi Sasaran Program	Peningkatan kapabilitas kelembagaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang lincah, profesional, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis digital, BKN terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen ASN yang efisien dan terintegrasi, termasuk layanan administrasi dan pengelolaan data ASN. Transformasi ini diharapkan mendorong peningkatan kecepatan dan transparansi serta akurasi, sehingga memperkuat kedudukan BKN sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan tata kelola Manajemen ASN yang adaptif dan terpercaya.
Indikator Kinerja Program	Nilai Reformasi Birokrasi BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi : Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN yang dilakukan oleh KemenPAN-RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta PermenPANRB No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan KemenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Makna reformasi birokrasi adalah: 1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan; 2. Pertaruhan besar organisasi dalam menghadapi tantangan abad ke-21; 3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang cukup besar; 4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa 5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
	Formula :
	Hasil penilaian oleh Kemenpan RB yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN
	Tujuan :
	Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU	() Tinggi (X) Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKU	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN oleh KemenpanRB
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi risiko	1. Melakukan revidu dan mengklasifikasi rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi penilaian indikator pada tingkat meso sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Memastikan setiap indikator dalam penilaian reformasi birokrasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen kinerja unit kerja terkait; 3. Membentuk tim kerja dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai bentuk antisipasi perubahan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka memastikan rencana aksi yang telah disusun dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 3. Nilai Evaluasi AKIP BKN

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Nilai Evaluasi AKIP BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi : • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan untuk mengukur implementasi Sistem AKIP (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. • Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. • Nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di BKN yang dilakukan oleh KemenPAN-RB dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Hasil evaluasi AKIP terbagi menjadi 7 predikat sebagai berikut: 1. AA (>90 - 100) Sangat Memuaskan 2. A (>80 - 90) Memuaskan 3. BB (>70 - 80) Sangat Baik 4. B (>60 - 70) Baik 5. CC (>50 - 60) Cukup (Memadai) 6. C (>40 - 50) Kurang 7. D (>0 - 30) Sangat Kurang

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Formula :
	Hasil penilaian oleh KemenPAN-RB yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BKN oleh KemenpanRB
	Tujuan :
	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di BKN 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di BKN 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di BKN 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	() Tinggi () Sedang (X) Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input (X) Lead Proses () Lag Output () Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Biro Perencanaan dan kerja sama
Sumber Data	Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja BKN oleh Kementerian PANRB
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Tujuan :
	Mewujudkan ASN BKN yang berkualitas yakni ASN BKN yang berkompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi.
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU	() Tinggi (X) Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKU	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sumber Data	Hasil Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi Resiko	Perbaikan pada komponen pelaksanaan Sistem Merit di BKN

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 5. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Utama BKN

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Utama BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indeks yang diukur sesuai dengan Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, dan Biro Perencanaan dan Organisasi
	Formula :
	Perhitungan nilai indeks mengacu pada pengumpulan nilai indeks dari semua unit kerja yang ada di lingkup Sekretariat Utama $N = \frac{A+B+C+D+E}{5}$ N = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama A = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Umum B = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Keuangan C = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro SDM dan Organisasi D = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik E = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Perencanaan dan Kerjasama

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Tujuan :
	Untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Utama
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	() Tinggi (X) Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input (X) Lead Proses () Lag Output () Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro SDM dan Organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Biro Perencanaan dan Kerjasama
Sumber Data	Laporan rekapitulasi Survei Kepuasan di lingkungan Sekretariat Utama
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi (X) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi risiko	Meningkatkan layanan sekretaris utama terhadap customer dan melakukan evaluasi kepada biro yang kurang maksimal memberikan layanan.

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 6. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Utama BKN

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Utama BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indeks yang diukur sesuai dengan Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, dan Biro Perencanaan dan Organisasi
	Formula :
	Perhitungan nilai indeks mengacu pada pengumpulan nilai indeks dari semua unit kerja yang ada di lingkup Sekretariat Utama $N = \frac{A+B+C+D+E}{5}$ N = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama A = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Umum B = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Keuangan C = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro SDM dan Organisasi D = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik E = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Perencanaan dan Kerjasama

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Tujuan :
	Untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Utama
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	() Tinggi (X) Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input (X) Lead Proses () Lag Output () Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro SDM dan Organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Biro Perencanaan dan Kerjasama
Sumber Data	Laporan rekapitulasi Survei Kepuasan di lingkungan Sekretariat Utama
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi (X) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi risiko	Meningkatkan layanan sekretaris utama terhadap customer dan melakukan evaluasi kepada biro yang kurang maksimal memberikan layanan.

LEVEL 1
SEKRETARIAT UTAMA

Mitigasi Resiko	1. Menggunakan teknologi informasi untuk manajemen kinerja unit (MAKO) 2. Menyusun pohon kinerja dengan mencerminkan tugas dan fungsi sesuai mandat peraturan perundang-undangan
-----------------	--

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 4. Nilai Sistem Merit BKN

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Nilai Sistem Merit BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indeks Pelaksanaan Sistem Merit BKN adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN yang disebutkan di dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang PNS, mulai dari Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan karir, promosi, dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta Sistem Informasi. Penilaian dilakukan 2 tahun sekali, terakhir dilakukan tahun 2024 dimana untuk nilainya berlaku selama 2 tahun yaitu tahun 2024 dan 2025.
	Formula :
	Penilaian Sistem Merit dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan kategori : Kategori I (100-174) = Buruk Kategori II (175-249) = Kurang Kategori III (250-324) = Baik Kategori IV (325-400) = Sangat Baik

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 7. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dilingkungan Sekretariat Utama

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Lingkungan Sekretariat Utama
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pegawai yang dihitung sebagai realisasi kinerja unit adalah pegawai yang mengisi rencana aksi dan mengisi realisasi kinerja harian. Terdapat pengecualian terhadap beberapa pegawai dengan kriteria cuti dan tugas belajar tidak perlu mengisi e-kinerja harian namun dianggap sudah mengisi e-kinerja harian.
	Formula :

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Persentase pegawai di lingkungan Sekretariat Utama yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Deputi Sekretariat Utama. $N = \frac{A1+A2+A3+A4+A5}{B} \times 100\%$ N = Persentase pegawai di lingkungan Sekretariat Utama yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja A1 = Persentase pegawai di Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang melaporkan kinerja harian A2 = Persentase pegawai di Biro keuangan yang melaporkan kinerja harian A3 = Persentase pegawai di Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang melaporkan kinerja harian A4 = Persentase pegawai di Biro Hukum dan Komunikasi Publik yang melaporkan kinerja harian A5 = Persentase pegawai di Biro Umum yang melaporkan kinerja harian B = Jumlah seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama
	Tujuan : Untuk mengetahui kepatuhan dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Utama BKN
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi () Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Keuangan, Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum dan komunikasi Publik, Biro Umum
Sumber Data	Rekapitulasi Pengisian Kinerja Harian di lingkungan sekretariat utama
Jenis Penghitungan Data	☐ Akumulasi ☒ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir
Status Data	☒ Hasil Penghitungan Raw Data ☐ Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
Mitigasi risiko	Pemantauan rutin bagi pejabat penilai melalui laporan rekap harian bagi pimpinan unit.

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 8. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Badan Kepegawaian Negara

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pegawai yang dihitung sebagai realisasi kinerja unit adalah pegawai yang mengisi rencana aksi dan mengisi realisasi kinerja harian. Terdapat pengecualian terhadap beberapa pegawai dengan kriteria cuti dan tugas belajar tidak perlu mengisi e-kinerja harian namun dianggap sudah mengisi e-kinerja harian.

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Formula : Persentase pegawai di Badan Kepegawaian Negara yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Negara $N = \frac{A}{B} \times 100\%$ N = Persentase pegawai di Badan Kepegawaian Negara Utama yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja A = Persentase pegawai di Badan Kepegawaian Negara yang melaporkan kinerja harian di aplikasi e-Kinerja B = Jumlah seluruh pegawai di Badan kepegawaiaian Negara
	Tujuan : Untuk mengetahui kepatuhan dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Utama BKN
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi () Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi
Sumber Data	Rekapitulasi Pengisian Kinerja Harian di Badan Nepegawaian Negara
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi risiko	Pemantauan rutin bagi pejabat penilai melalui laporan rekap harian bagi pimpinan unit.

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 9. Opini BPK atas Laporan Keuangan BKN

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Program	Opini BPK atas Laporan Keuangan BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Opini Atas Laporan Keuangan BKN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern
	Formula :
	Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah : 1. Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>) 2. Wajar dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>) 3. Tidak Wajar (<i>Adversed Opinion</i>) 4. Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer of Opinion</i>)
	Tujuan :
	Pencapaian prestasi terhadap kualitas Laporan Keuangan BKN
Satuan Pengukuran	Predikat

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	() Tinggi Rendah () Sedang (X)
Tingkat Validitas IKP	(X) Lead input () Lead Proses () Lag Output () Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Keuangan
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi risiko	1. Melakukan tertib administrasi laporan keuangan BKN 2. Adanya proses verifikasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 10. Indeks SPBE BKN

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Indeks SPBE BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indeks SPBE BKN merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBE di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kategori indeks SPBE sebagai berikut: < 1,8 : kurang 1,8 – 2,6 : cukup 2,6 – 3,5 : baik 3,5 – 4,2 : sangat baik 4,2 – 5,0 : memuaskan
	Formula :
	Nilai indeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Laporan Hasil Evaluasi Sistem

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Tujuan :
	1. Mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE di BKN 2. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE di BKN 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di BKN
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	() Tinggi (X) Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKN oleh KemenpanRB
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi risiko	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik 2. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara periodik

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 11. Nilai Level Maturitas SPIP Terintegrasi BKN

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Nilai Level Maturitas SPIP Terintegrasi BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.
	Formula :
	Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah.		
	No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor
	1	Rintisan	$1.0 \leq \text{Skor} < 2.0$
	2	Berkembang	$2.0 \leq \text{Skor} < 3.0$
	3	Terdefinisi	$3.0 \leq \text{Skor} < 4.0$
	4	Terukur dan terkelola	$4.0 \leq \text{Skor} < 4.5$
	5	Optimum	≥ 4.5
Tujuan :			
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.			
Satuan Pengukuran	Level		
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya		
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi () Sedang () Rendah		
Tingkat Validitas IKP	(X) Lead input () Lead Proses () Lag Output () Lag Outcome		
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading		
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Organisasi		
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP		
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir		

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 12. Indeks Pengawasan kearsipan BKN

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Indeks Pengawasan kearsipan BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas tata Kelola kebijakan, sistem kearsipan, strategi branding, serta pengelolaan jejaring informasi dilingkungan BKN. Dalam aspek kebijakan, focus utama adalah pada perumusan dan implementasi regulasi yang lebih adaptif serta berbasis data guna mendukung kinerja organisasi. Sementara itu, sistem kearsipan diperkuat melalui digitalisasi dokumen dan optimalisasi manajemen arsip agar lebih tertata, mudah diakses, serta sesuai dengan standar kearsipan nasional. Pada aspek branding, strategi komunikasi dan publikasi terus dikembangkan untuk membangun citra positif BKN sebagai institusi yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan Publik. Nilai yang dihasilkan dari pelaksanaan audit kearsipan dilingkungan BKN yang mana audit tersebut dilakukan oleh tim audit eksternal yaitu Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
	Formula :

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan, nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi hasil pengawasan kearsipaan eksternal dan nilai pengawasan arsip internal. Aspek penilaian pengawasan eksternal : - Kebijakan - Pembinaan - Pengelolaan arsip dinamis, meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusunan arsip - Sumber daya kearsipan yang meliputi SDM kearsipan, organisai kearsipan, prasarana dan sarana serta pendanaan Aspek Penilaian pengawasan internal “ - Pengawasan sistem kearsipan internal - Pengawasan pengelolaan arsip aktif
	Tujuan : Penilaian atas kepatuhan BKN dalam pengelolaan arsip terhadap kebijakan kearsipan
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	() Tinggi (X) Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Umum
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Kearsipan BKN oleh ANRI
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Status Data	☐ Hasil Penghitungan Raw Data ☒ Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan
Mitigasi risiko	1. Koordinasi antara pengelola kearsipan dengan pimpinan 2. Pemberian edukasi tupoksi unit kerja kepada setiap pegawai

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 13. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indikator ini merupakan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Negara
	Formula :
	Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja kementerian Negara/Lembaga. Nilai kualitas pelaksanaan anggaran terhadap regulasi pelaksanaan anggaran yang diatur pada regulasi IKPA Kementerian Keuangan, terdiri atas ; - Penyerapan anggaran; - Belanja Kontraktual; - Penyelesaian tagihan; - Pengeloaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (UP/TUP); - Dispensasi penyampaian surat perintah membayar (SPM) $\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Tujuan :
	Sebagai sarana evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran BKN.
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi () Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Biro Keuangan
Sumber Data	Nilai IKPA dari Kementerian Keuangan
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	() Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi risiko	Monitoring pelaksanaan indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran IKPA

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 14. Persentase Capaian Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan di Lingkungan Sekretariat Utama

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Persentase Capaian Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan di Lingkungan Sekretariat Utama
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Mengukur sejauh mana unit kerja dilingkungan Sekretariat Utama mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan.
	Formula :
	$N = A/B \times 100\%$ N= Persentase Capaian Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan di Lingkungan Sekretariat Utama A= Jumlah inovasi yang direalisasikan dilingkungan Sekretariat Utama B= Jumlah inovasi yang direncanakan dilingkungan Sekretariat Utama
	Tujuan :

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Status Data	(☒) Hasil Penghitungan Raw Data (☐) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X ☒) Maximize (☐) Minimize (☐) Stabilize
Periode Pelaporan	(☐) Bulanan (☐) Triwulanan (☐) Semesteran (☒) Tahunan
Mitigasi risiko	1. Potensi lingkungan pengendalian tidak berjalan secara optimal 2. Potensi ketidaktepatan penilaian risiko yang disusun oleh tim UPR 3. Potensi kegiatan pengendalian tidak terlaksana dan terdokumentasi dengan baik

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	Untuk meningkatkan kualitas layanan di Lingkungan Sekretariat Utama
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi () Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Keuangan, Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum dan komunikasi Publik, Biro Umum
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi di lingkungan Sekretariat utama tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi risiko	Menyusun rencana inovasi yang terukur dan realistis.

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 15. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Sekretariat Utama

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Sekretariat Utama
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri. Apabila terdapat surat yang memiliki kurun waktu atau masa tenggat waktu permintaan tindaklanjut/respon kurang dari atau lebih dari 4 hari kerja, maka selama dapat memenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut maka dihitung telah memenuhi SLA 4 hari kerja.
	Formula :
	$N = A/B \times 100\%$ N= Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari kerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan kepegawaian Negara

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	A= Jumlah surat masuk yang telah ditindaklanjuti/direspon paling lambat 4 hari kerja B = Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal
	Tujuan : Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di lingkungan sekretariat Utama.
Satuan Pengukuran	Persen
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi () Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Keuangan, Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum dan komunikasi Publik, Biro Umum
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Persuratan di lingkungan Sekretariat utama tahun 2026
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi (X) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

LEVEL 1
SEKRETARIAT UTAMA

Mitigasi risiko	Koordinasi antara pengelola persuratan dengan pimpinan dan setiap pegawai
-----------------	---

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 16. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Sekretariat Utama

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Utama
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkup Setempat BKN memperlihatkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran
	Formula :
	$PA = \frac{Ai}{An} \times 100\%$
	Ket: PA = Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Ai = Jumlah Serapan Anggaran dan Fisik An = Perencanaan Anggaran dan Fisik
	Tujuan :
	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran maupun fisik yang sudah direncanakan sebelumnya
Satuan Pengukuran	Persen

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output () Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi () Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	(X) Lead input () Lead Proses () Lag Output () Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro SDM dan Organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Biro Perencanaan dan Kerjasama
Sumber Data	Laporan hasil penyerapan anggaran dan fisik keseluruhan unit di lingkungan Sekretariat Utama BKN
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Mitigasi risiko	1. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

IKP 17. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di Lingkungan Sekretariat Utama

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di Lingkungan Sekretariat Utama
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi : Suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas tata kelola di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan jumlah temuan yang diidentifikasi oleh BPK maupun Inspektorat melalui audit keuangan, audit operasional, maupun audit kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sementara, audit operasional yang sering dikenal

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

	juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern. Semakin kecil rasio temuan yang terjadi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan, operasional, dan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, karena menunjukkan kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
	Formula :
	Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat $N = A/B \times 100\%$ N = Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Sekretariat Utama Badan kepegawaian Negara A = Jumlah Temuan Audit/ Pemeriksaan atas pemeriksaan yang dilakukan B = Jumlah Kegiatan (Surat Perintah Membayar) yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat atas Unit kerja dilingkungan Sekretariat Utama
	Tujuan :
	Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu unit kerja dilingkungan Sekretariat Utama dalam memperbaiki tata kelola
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi () Sedang () Rendah
Tingkat Validitas IKP	() Lead input () Lead Proses () Lag Output (X) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	() Cascading Peta (X) Cascading Non Peta () Non Cascading

LEVEL 1

SEKRETARIAT UTAMA

Metode Cascading	(X) Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Keuangan, Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum dan komunikasi Publik, Biro Umum
Sumber Data	Rekapitulasi Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan SPM
Jenis Penghitungan Data	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	() Maximize (X) Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi risiko	Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil audit, memantau progres penyelesaian secara triwulanan, dan melaporkan realisasi tindak lanjut kepada Inspektorat.